

Proyeksi APBD Kutim Turun Tahun Depan Pekab Siapkan Strategi Efisiensi



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025

Sangatta – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam. Dari total APBD tahun ini yang mencapai Rp9,89 triliun, Pemkab memproyeksikan anggaran tahun depan hanya Rp4,86 triliun atau turun lebih dari separuhnya. Penurunan signifikan itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, saat membacakan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kutim, Jumat (31/10). “Rancangannya segitu, mungkin bisa bertambah tapi enggak banyak. Itu dalam pembahasannya mungkin bisa bertambah. Paling, sedikitlah,” ujar Mahyunadi.

Dalam nota pengantar itu, pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan mencapai Rp4,867 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, pendapatan transfer Rp4,34 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp91,98 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,842 triliun, dan penyertaan modal daerah hanya Rp25 miliar. Mahyunadi mengakui, turunnya proyeksi anggaran akan berdampak pada pola belanja pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Kutim menyiapkan langkah efisiensi di seluruh sektor, termasuk menyesuaikan skala prioritas program pembangunan. “Kalau kuat anggarannya, ya kita prioritaskan untuk tetap dijalankan. Tapi kalau tidak kuat anggaran ini, semuanya juga harus turun. Misalnya belanja pegawai,” terangnya.

Meski demikian, Mahyunadi memastikan 50 program unggulan tetap dijalankan, hanya besarnya yang akan disesuaikan. “Program itu bisa gendut, bisa kurus. Tinggal yang penting semua misinya tercapai. Tinggal besarnya yang mungkin disesuaikan dari misi itu,” tegasnya.

Sementara itu, Mahyunadi menyebut sejumlah program yang memiliki target capaian angka tetap dipastikan dapat terealisasi dalam lima tahun. Program itu di antaranya bantuan RT Rp250 juta per tahun, pembangunan 1.000 rumah layak huni, serta pencetakan lahan pertanian seluas 100 ribu hektare yang akan diupayakan melalui bantuan keuangan dan beberapa sumber lain. Selain itu, anggaran juga akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur daerah. “Efisien itu bukan pemangkasan. Efisien itu, mengefektifkan lebih lagi anggaran. Jadi anggaran yang terlalu banyak seperti seremoni akan dikurangi. Kita lebih fokus kepada anggaran peningkatan infrastruktur,” tandasnya. **(jfr/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Proyeksi APBD Kutim Turun Tahun Depan Pemkab Siapkan Strategi Efisiensi, 01/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
3. Dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.